

Model Perilaku Pembayar Pajak Restoran: Kontribusi Faktor Indikator Makroekonomi

Verni Yuliati Ismail¹, Ely Nurhayati², Auliffi Ermian Challen³, Elmanizar⁴

^{1,2,3,4}Universitas Yarsi, Jakarta, Indonesia

ABSTRAK

Pajak Restoran merupakan salah satu instrumen Pendapatan Asli Daerah yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pajak restoran yang didapatkan oleh Pemerintah Daerah sejatinya mencerminkan seperti apa perilaku pembayar pajak restoran tersebut. Banyak faktor yang memengaruhi perilaku pembayar pajak restoran, termasuk salah satunya adalah indikator makroekonomi. Mengingat indikator makroekonomi kerap berfluktuasi dan penuh dengan ketidakpastian, maka menarik untuk menganalisis seberapa besar kontribusi faktor indikator makroekonomi terhadap perilaku pembayar pajak restoran. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah metode panel data analisis dengan menggunakan data cross section dan time series. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor makroekonomi yang signifikan mempengaruhi perilaku pembayaran pajak restoran dalam negeri adalah PDRB subsektor dan perlu menjadi perhatian dalam pengambilan kebijakan adalah variabel PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, pengangguran, wajib pajak aktif, indeks tendensi konsumen, dan inflasi.

ABSTRACT

Restaurant Tax is an instrument of Original Regional Income that is important in increasing regional income. The restaurant tax obtained by the regional government reflects the behaviour of restaurant taxpayers. Many factors influence the behaviour of restaurant taxpayers, including macroeconomic indicators. Considering that macroeconomic indicators often fluctuate and are uncertain, it is interesting to analyze how much macroeconomic indicators contribute to the behaviour of restaurant taxpayers. The method used in this research is the panel data analysis method using cross-section and time series data. The analysis results show that the macroeconomic factors that significantly influence domestic restaurant taxpayer habits are sub-sector GRDP and that need to be considered in policymaking are the GRDP variables in the accommodation and food and drink provision sector, unemployment, active taxpayers, consumer tendency index and inflation.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima 16 Oktober 2023

Direvisi 10 November 2023

Revisi diterima Desember 2023

Kata Kunci:

Makroekonomi, Pajak, Restoran
Macroeconomics, *Restaurant, Tax*

Penulis Koresponden:

Ely Nurhayati
Universitas YARSI
Jalan Batuampar III Jakarta Timur, DKI
Jakarta, Indonesia
ely.nurhayati@yarsi.ac.id

How to Cite: Ismail, et. al. (2024). Model Perilaku Pembayar Pajak Restoran: Kontribusi Faktor Indikator Makroekonomi. *ANALYSIS: Accounting, Management, Economics, and Business*, 2(1) 12 - 24. doi: 10.56855/analysis.v2i1.876

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah saat ini mulai diarahkan pada pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan kebijakan pembangunan yang tidak merusak dan melindungi lingkungan, namun juga mendorong inovasi dan menghasilkan keuntungan (Daly, 2006; Emas, 2015). Pembangunan berkelanjutan tersebut tentunya membutuhkan anggaran untuk dapat direalisasikan. Menurut Martinez-Vazquez dan Bird Richard M (2014) anggaran adalah tempat lahir atau matinya impian para perencana pembangunan dan reformis. Apa pun ideologi atau warna politik yang berlaku pada suatu pemerintahan tertentu, pembangunan berkelanjutan harus dibiayai dari pendapatan pemerintah. Kebutuhan pembiayaan tersebut terutama dapat dipenuhi dari pajak (Long & Miller, 2017).

Dalam usaha menopang pembangunan berkelanjutan di daerah, pemerintah daerah ditantang untuk mempersiapkan strategi perencanaan pembangunan yang akan diambil. Pemerintah Daerah dituntut untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri sehingga dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki (Wirawati & Putra, 2019). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan yang diperoleh oleh daerah yang berasal dari sumber yang tersedia dalam wilayahnya sendiri, dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Mariani, 2018; Febri, 2018).

Salah satu penerimaan daerah yang memiliki beberapa sumber dan digunakan untuk membiayai pembangunan adalah pajak (Yeni & Galih, 2018). Dalam memajukan daerah dan membiayai pembangunan dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan penerimaan daerah, dimana setiap orang sadar untuk membayar pajak sesuai kewajibannya. Pajak daerah merupakan komponen yang digunakan untuk membiayai kebutuhan suatu daerah (Irene, 2018; Linda *et al.*, 2019). Sehingga pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan berdasarkan Undang-undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan daerah (Lumintang & Tinangon, 2015).

Peningkatan PAD menjadi salah satu fokus baik melalui pemerintahan yang lebih baik atau melalui penciptaan sumber-sumber pendapatan baru serta melalui strategi lain (Islmet, 2019). Kewenangan Pajak Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (Sugiarto et al., 2015).

Menurut Irene dan Renniwaty (2018), pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah dengan potensi yang semakin berkembang seiring dengan diperhatikannya sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi atau pariwisata. Pajak restoran adalah salah satu pajak

yang dikelola secara mandiri oleh masing-masing pemerintah daerah, dengan demikian pajak restoran merupakan salah satu sumber lokal yang dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah (Science, 2019).

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, menjelaskan bahwa restoran adalah fasilitas penyedia makan dan/ minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering. Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Jasa yang disediakan oleh restoran termasuk layanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan dan di tempat lain (Lalas & Prima, 2019). Pembayar pajak restoran adalah konsumen yang menggunakan pelayanan yang disediakan oleh restoran pada saat konsumen membeli makanan dan/atau minuman di restoran tersebut. Kepatuhan konsumen untuk membayar pajak restoran ini menurut Brockmann H, Genschel P, Seelkopf L (2016) dapat dijelaskan dengan pendekatan berbasis norma. Konsumen sebagai warga negara wajib untuk mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah. Dalam hal ini, pembayaran pajak restoran dilakukan langsung bersamaan dengan konsumen membayar makanan dan minuman yang dibeli di restoran, berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Walaupun demikian, mekanisme pembayaran pajak restoran dilakukan oleh pihak restoran kepada pemerintah daerah.

Perilaku pembayar pajak restoran diproyeksi oleh penerimaan pajak restoran dan dapat diukur berdasarkan data kapasitas, rata-rata harga makanan/minuman, rata-rata pengunjung, dan jumlah hari. Menurut Utami dan Ningsih (2018), efektivitas pajak daerah adalah penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran, apakah sudah efektif atau sebaliknya, yang dapat dilihat dari persentase penerimaan pajak daerah yang terealisasi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Penelitian Linggar (2016) dan Yulindari *et al.* (2017) mengemukakan bahwa efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan ataupun target yang terlebih dahulu ditentukan. Dengan demikian, efektivitas penerimaan pajak restoran di suatu daerah, bergantung pada perilaku pembayar pajak restoran dalam melakukan pembelian makanan dan minuman di restoran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku pembayar pajak restoran, yang dilihat berdasarkan perilaku konsumen dalam membeli makanan dan minuman di restoran. Secara mikro, menurut Kotler dan Keller (2016), perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Penelitian ini melihat dengan perspektif yang berbeda, yaitu mengembangkan model perilaku pembayar pajak restoran berdasarkan pengaruh faktor-faktor indikator makroekonomi. Apakah faktor-faktor indikator makro juga berkontribusi dalam mempengaruhi perilaku pembayar pajak restoran?

Variabel makroekonomi merupakan variabel yang banyak digunakan para ekonom untuk mengukur kinerja perekonomian di suatu wilayah. Indikator makroekonomi merupakan salah satu faktor penentu penerimaan pajak di wilayah tertentu, termasuk penerimaan pajak restoran (Muibi & Sinbo, 2013). Rasio pajak terhadap PDB yang rendah selalu menjadi masalah bagi pembangunan ekonomi dan

salah satu penjelasan utama dari terjadinya defisit anggaran yang tinggi (Chaudhry & Munir, 2010). Stabilitas ekonomi makro dan tingkat kegiatan ekonomi adalah pendorong utama perilaku pembayaran pajak.

Faktor makroekonomi yang mempengaruhi perilaku pembayaran pajak diantaranya adalah Pendapatan Domestik Bruto (PDB), inflasi, pajak penghasilan, pengangguran dan impor (Velaj & Prendi, 2014). Menurut Lucotte (2010) jika laju inflasi meningkat maka penerimaan pajak akan turun. Apabila PDB tumbuh, maka penerimaan yang dipungut dari pajak akan meningkat (Clausing, 2007 dalam Velaj & Prendi, 2014). Sedangkan apabila pengangguran meningkat, pendapatan yang dikumpulkan dari pajak akan turun (Kubatov & Rihova, 2009 dalam Velaj & Prendi, 2014), dan jika impor barang dan jasa tumbuh, penerimaan pajak yang dipungut akan meningkat (Qazi 2010 dalam Velaj & Prendi, 2014).

Determinan makroekonomi lainnya yang juga mempengaruhi penerimaan pajak adalah perubahan tingkat pendapatan, nilai tukar, dan tingkat inflasi. Penerimaan pajak cenderung responsif secara signifikan terhadap variabel-variabel tersebut (Muibi & Sinbo, 2013). Elastisitas pendapatan pajak menunjukkan bahwa kenaikan tingkat pendapatan akan menyebabkan peningkatan penerimaan pajak. Adapun menurut Castro dan Camarillo (2014) variabel makro ekonomi yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah PDB perkapita dan penanaman modal asing. PDB perkapita dan penanaman modal asing berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Menurut Putri (2013) ada pengaruh secara bersama-sama pada variabel jumlah penduduk, pendapatan per kapita, inflasi, dan jumlah surat ijin usaha terhadap penerimaan pajak. Pendapatan per kapita dan jumlah surat ijin usaha berpengaruh signifikan positif, sedangkan inflasi berpengaruh signifikan negatif. Sedangkan menurut Kadafi *et al.* (2020) secara parsial PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan. Kemudian secara bersama-sama (simultan) PDRB, jumlah penduduk dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah. Adapun variabel makroekonomi yang mempengaruhi menurut (Sasana, 2017) adalah PDRB perkapita, jumlah wajib pajak, dan inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Hasil kajian Gupta (2007) dalam working paper IMF menunjukkan bahwa faktor struktural seperti PDB per kapita, pangsa pertanian dalam PDB, keterbukaan perdagangan dan bantuan luar negeri secara signifikan juga mempengaruhi kinerja pendapatan pajak suatu perekonomian. Faktor-faktor lain termasuk korupsi, stabilitas politik, bagian pajak langsung dan tidak langsung, dan indeks kinerja pendapatan juga mempengaruhi penerimaan pajak suatu wilayah.

Variabel lainnya, yaitu konsentrasi produk ekspor dan kemiskinan mempengaruhi secara negatif pendapatan pajak non-sumber daya. Pengaruh diversifikasi produk ekspor terhadap kinerja penerimaan pajak bukan sumber daya bergantung pada tingkat kemiskinan. Nampaknya diversifikasi produk ekspor berpengaruh positif terhadap kinerja penerimaan pajak non-sumber daya di negara-negara yang mengalami tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Dari perspektif kebijakan,

kebijakan yang mendukung diversifikasi keranjang produk ekspor dan pengurangan kemiskinan akan berkontribusi pada peningkatan kinerja penerimaan pajak non-sumber daya di negara berkembang (Gnangnon, 2021). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirasa perlu untuk menganalisis model perilaku pembayar pajak restoran: kontribusi faktor indikator makroekonomi.

METODOLOGI

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif yang menggunakan metode ekonometrika panel data analisis. Analisis data panel merupakan analisis ekonometrika yang terdiri dari data *cross section* dan data *time series*. Data *cross section* terdiri dari data dari masing-masing kota di DKI Jakarta, yaitu kota Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan dan Kepulauan Seribu. Data *time series* yang digunakan merupakan data sejak tahun 2015 hingga tahun 2019. Berikut adalah model matematis dari analisis yang dilakukan:

$$TR_{it} = \alpha + \beta_1 \ln Pres_{it} + \beta_2 Grw_{it} + \beta_3 Pov_{it} + \beta_4 \ln Pop_{it} + \beta_5 Unemp_{it} + \beta_6 INF_{it} + \beta_7 \ln WP_{it} + \beta_8 ITK_{it} + \beta_9 DDI_{it} + \beta_{10} FDI_{it}$$

Dimana:

TR	= <i>Tax Revenue</i> Pajak Restoran, Perilaku Pembayar Pajak Restoran
Pres	= PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum
Grw	= Pertumbuhan PDRB
Pov	= Poverty
Pop	= Populasi
Unemp	= Unemployment
INF	= Inflasi
WP	= Wajib Pajak Aktif
ITK	= Indeks Tendensi Konsumen
DDI	= Domestic Direct Investment Hotel dan Restoran
FDI	= Foreign Direct Investment Hotel dan Restoran
Ln	= Logaritma Natural
i	= cross section
t	= time series

Data yang digunakan merujuk pada model ekonometrika yang digunakan dalam penelitian, yaitu variabel penerimaan pajak, *Product Domestic Regional Bruto*, *Product Domestic Regional Bruto Per Capita*, populasi, inflasi, FDI, DDI, *unemployment*, dan kemiskinan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, Bank Indonesia, Kementerian Investasi (BKPM) dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Variabel endogen (*dependent variable*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel penerimaan pajak yang merupakan *proxy* dari perilaku pembayar pajak restoran. Variabel eksogen yang digunakan terdiri dari variabel PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (*pres*), Pertumbuhan PDRB (*grw*), Kemiskinan (*pov*), Populasi (*pop*), Pengangguran (*unemp*), wajib pajak aktif (*wp*), Indeks Tendensi Konsumen (ITK), Inflasi (INF), Penanaman Modal Dalam Negeri (DDI) hotel dan restoran, Penanaman Modal Asing (PMA) hotel dan restoran.

Penelitian ini menggunakan jumlah wajib pajak aktif yang tidak berubah antar waktu sehingga estimasi dilakukan dengan menggunakan *random effect model* (REM). Menurut Wooldridge (2012) jika variabel eksogen tidak berubah antar waktu maka metode *fixed effect model* (FEM) tidak dapat digunakan dan *random effect model* (REM) lebih efisien digunakan dibandingkan dengan metode *pooled least squared*.

Asumsi klasik yang sering menjadi masalah adalah heteroskedastisitas dan autokorelasi. Uji kedua asumsi klasik ini dilakukan pada metode PLS dan FEM karena model harus terbebas dari masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi. Sebaliknya, uji asumsi klasik tersebut tidak perlu dilakukan pada model REM karena model REM telah menggunakan teknik *generalized least square* (GLS). Menurut Hardiyanto *et al.* (2013) metode GLS mengasumsikan model panel data telah terbebas dari masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi.

Tabel 1. Hasil Estimasi Variabel Makro Yang Memengaruhi Perilaku Pembayaran Pajak Restoran

<i>Variables</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Probability</i>
<i>lnpres</i>	0.4473860	0.000
<i>grw</i>	0.0435575	0.244
<i>pov</i>	0.3363237	0.000
<i>lnpop</i>	4.1470470	0.377
<i>unemp</i>	-0.5451880	0.065
<i>lnwp</i>	1.1859550	0.000
<i>itk</i>	0.1556258	0.000
<i>inf</i>	0.2667733	0.033
<i>lnddi</i>	-0.0875620	0.002
<i>lnfdi</i>	-0.1634923	0.000
<i>cons</i>	-47.1171900	0.269
<i>R-squared</i>	0.8303	
<i>Adj R-squared</i>	0.9988	
<i>Prob > Chi2</i>	0.0000	

Model panel data yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

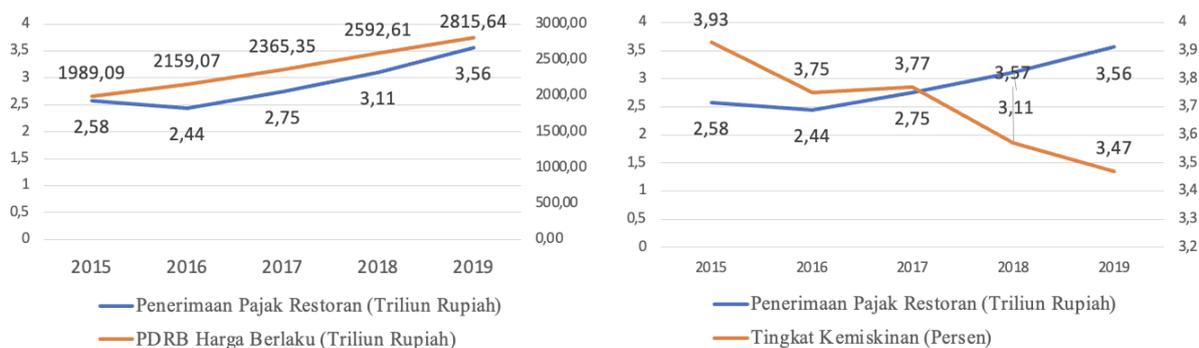
$$TR_{it} = \alpha + 0.447 \ln Pres_{it} + 0.043 Grw_{it} + 0.336 Pov_{it} + 4.147 \ln Pop_{it} - 0.545 Unemp_{it} + 0.266 INF_{it} + 1.186 \ln WP_{it} + 0.156 ITK_{it} - 0.088 \ln DDI_{it} - 0.163 \ln FDI_{it}$$

Hasil estimasi model menampilkan nilai probabilitas Chi2 lebih kecil dari taraf nyata 5% ($0.00 < 0.05$). Artinya, setidaknya ada satu variabel eksogen yang digunakan berpengaruh nyata terhadap variabel endogen sehingga model layak untuk digunakan. Berdasarkan nilai *R-squared*, variabel eksogen juga terbukti mampu menjelaskan keragaman perilaku pembayaran pajak restoran sebesar lebih dari 83.03% dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Berdasarkan hasil estimasi, model untuk perilaku pembayar pajak restoran menghasilkan nilai koefisien determinasi (*R-squared*) sebesar 0.8303. Artinya, 83.03% keragaman perilaku pembayaran pajak restoran dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya, *sedangkan* 16.97% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Hasil estimasi model menunjukkan bahwa delapan variabel memiliki nilai probabilitas kurang dari taraf nyata (α) sebesar 10%. Artinya, ke delapan variabel tersebut signifikan atau berpengaruh nyata terhadap perilaku pembayaran pajak restoran, *ceteris paribus*. Kedelapan variabel tersebut adalah variabel PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (*pres*), Kemiskinan (*pov*), Pengangguran (*unemp*), wajib pajak aktif (*wp*), Indeks Tendensi Konsumen (*itk*), Inflasi (*inf*), Penanaman Modal Dalam Negeri (*ddi*) hotel dan restoran, Penanaman Modal Asing (*fdi*) hotel dan restoran.

Pembahasan

Variabel PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan variabel yang menunjukkan besarnya output dari jasa penyediaan akomodasi dan makan minum (restoran) pada tahun tertentu. Variabel PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum memiliki koefisien variabel yang positif. Koefisien variabel yang positif tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum akan mendorong peningkatan perilaku pembayaran pajak restoran. Setiap kenaikan 1% PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum akan mendorong peningkatan 0.447% perilaku pembayaran pajak restoran, sehingga penerimaan pajak meningkat. PDRB merupakan salah satu indikator kesejahteraan suatu wilayah, peningkatan PDRB dapat mefleksikan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum (16,17), karenanya peningkatan PDRB ini dapat mendorong meningkatnya perilaku belanja serta pembayaran pajak restoran. Gambar 1 menunjukkan bahwa tren PDRB, tingkat kemiskinan, dan perilaku pembayaran restoran relatif serupa.



Gambar 1. PDRB, Tingkat Kemiskinan, dan Perilaku Pembayaran Pajak Restoran

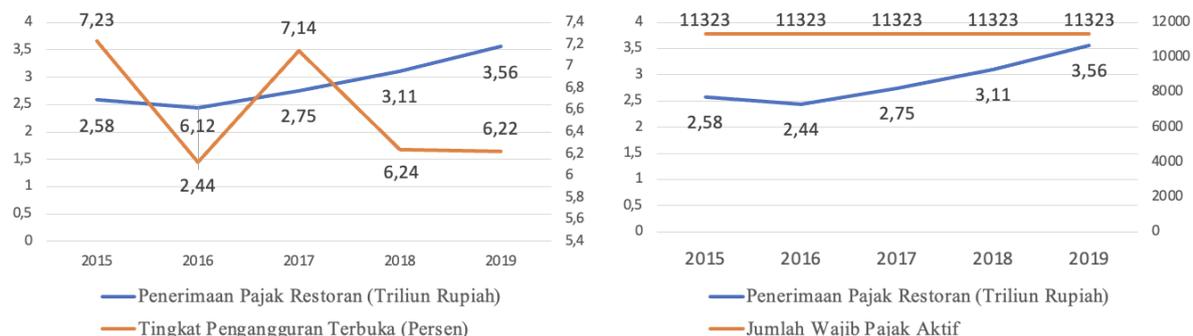
Pada variabel kemiskinan koefisien variabel adalah positif. Ini berarti bahwa terjadinya fenomena peningkatan kemiskinan justru akan mendorong peningkatan perilaku pembayaran pajak restoran. Setiap kenaikan kemiskinan sebesar 1% akan meningkatkan 0.336% perilaku pembayaran pajak restoran. Perilaku pembayaran pajak restoran yang tetap meningkat meskipun kemiskinan meningkat terjadi karena kelas menengah dan kelas atas tetap terus meningkatkan konsumsinya di restoran seiring dengan peningkatan inflasi meskipun jumlah kelas bawah atau masyarakat miskin meningkat. Hal ini terjadi karena belanja kuliner sedang populer dan telah menjadi *life style* baru di masyarakat, utamanya di masyarakat perkotaan. Menurut Yasin *et al.* (2017) di era sekarang ini wisata kuliner sangat diminati dan digandrungi oleh kebanyakan masyarakat. Minat wisata kuliner semakin besar dan semakin penting bagi masyarakat (Ignatov & Smith, 2006).

Kuliner dapat diartikan sebagai aktivitas mencicipi ragam jenis makanan dan minuman. Istilah kuliner di Indonesia berkembang sejak tahun 2005. Istilah wisata kuliner menjadi semakin populer sampai saat ini. Kepopuleran wisata kuliner diawali dari acara reality show di televisi. Konsep *reality show* tersebut meliputi beberapa restoran atau rumah makan diberbagai kawasan di Indonesia. Atas rekomendasi acara ini, berdampak terhadap tingkat popularitas restoran dan rumah makan tersebut (Entas, 2019). Dan kemudian pada akhirnya membentuk *life style* wisata kuliner di masyarakat. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara telah mengajukan rencana strategis untuk wisata kuliner (Horng & Tsai, 2010) dalam (Horng & Tsai, 2012).

Berdasarkan data tingkat kemiskinan dan perilaku pembayaran pajak restoran tahun 2015 hingga tahun 2017 pada Gambar 1, penurunan dan peningkatan kemiskinan selalu diikuti oleh penurunan dan peningkatan perilaku pembayar pajak restoran. Saat angka kemiskinan mengalami penurunan dari tahun 2015 ketahun 2016, angka perilaku pembayaran pajak restoran pun ikut mengalami penurunan. Dan pada tahun 2017 saat tingkat kemiskinan mengalami peningkatan, penerimaan pajak juga mengalami peningkatan. Hal ini mungkin terjadi karena konsumsi makanan dan minuman di restoran biasanya hanya dilakukan oleh masyarakat dari kelas menengah-atas. Menurut Olsen, Warde, and Martens (2000) tingkat pendapatan umumnya diasumsikan berkorelasi positif terhadap tingkat aktivitas makan di luar atau restoran. Karakteristik sosial memengaruhi tempat orang makan di luar secara signifikan dan substansial. Namun demikian perlu penelitian lebih lanjut terkait temuan ini.

Variabel Pengangguran (*unemployment*) memiliki hubungan yang negatif dengan perilaku pembayaran pajak restoran. Hal ini tercermin dari koefisien variabelnya yang negatif. Setiap penurunan 1% angka pengangguran maka akan menyebabkan kenaikan 0.054 persen angka perilaku pembayaran pajak restoran. Pengangguran dapat mengakibatkan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan perumahan. (Halizah & Darmawan, 2022). Sebaliknya, menurunnya pengangguran merupakan refleksi dari peningkatan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli dapat mendorong perilaku belanja sekaligus pembayaran pajak restoran pada masyarakat. Gambar 2 menunjukkan bahwa tren perilaku pembayaran pajak

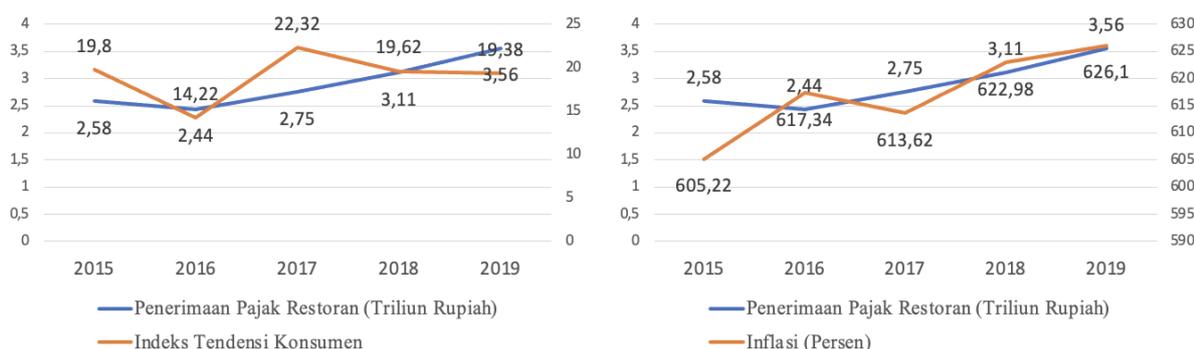
restoran cenderung meningkat, sedangkan tren tingkat pengangguran meskipun berfluktuasi namun cenderung menurun.



Gambar 2. Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Wajib Pajak Aktif dan Perilaku Pembayaran Pajak Restoran

Sedangkan pada variabel wajib pajak aktif tanda koefisiennya adalah positif. Ini menunjukkan bahwa variabel wajib pajak aktif memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan variabel perilaku pembayaran pajak restoran. Setiap peningkatan 1% angka wajib pajak aktif, akan mendorong peningkatan 1% perilaku pembayar pajak restoran. Semakin banyak jumlah wajib pajak aktif, maka akan semakin tinggi perilaku pembayaran pajak restoran. Gambar 2 menunjukkan bahwa tren wajib pajak aktif dan perilaku pembayaran pajak restoran cenderung relatif serupa.

Variabel Indeks Tendensi Konsumen (ITK) merupakan variabel indeks yang memberikan gambaran kondisi perekonomian pada triwulan berjalan dan satu triwulan kedepan menurut persepsi konsumen (rumah tangga). Berdasarkan hasil estimasi, variabel ITK memiliki koefisien variabel positif. Ini berarti bahwa variabel ITK memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan variabel perilaku pembayaran pajak restoran. Setiap kenaikan 1% Indeks Tendensi Konsumen, maka akan meningkatkan 0.156% perilaku pembayaran pajak restoran.



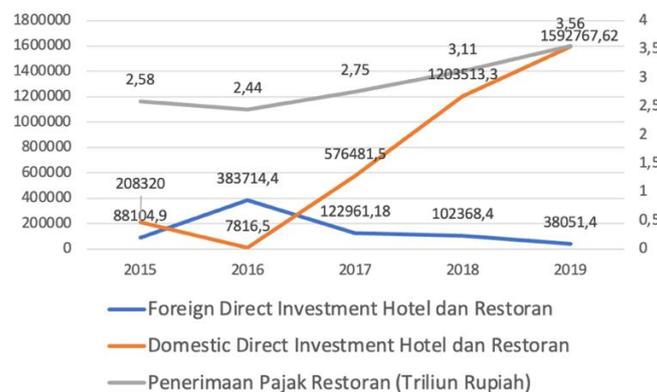
Gambar 3: Indeks Tendensi Konsumen, Inflasi, dan Perilaku Pembayaran Pajak Resto

Hal ini disebabkan karena positifnya indeks tendensi konsumen akan mendorong konsumen untuk cenderung berani berbelanja sehingga konsumsi meningkat, termasuk konsumsi pada sektor restoran. Sedangkan apabila indeks tendensi menurun, konsumen cenderung memilih untuk menyimpan uangnya untuk kepentingan berjaga-jaga sehingga masyarakat cenderung menahan diri dari berbelanja, termasuk

melakukan konsumsi di sektor restoran. Gambar 3 menunjukkan bahwa tren data ITK dan perilaku pembayaran pajak restoran cenderung sama-sama meningkat.

Pada variabel inflasi, berdasarkan hasil estimasi koefisiennya memiliki tanda yang positif. Ini menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan dengan variabel perilaku pembayaran pajak restoran. Setiap kenaikan 1% inflasi akan mendorong peningkatan 0.267 perilaku pembayaran pajak restoran. Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya inflasi adalah karena permintaan konsumen yang meningkat. Termasuk permintaan konsumen untuk membeli makanan dan minuman di restoran. Peningkatan tersebut tentu ditopang oleh kemampuan daya beli masyarakat, sehingga peningkatan inflasi dalam jangka pendek yang ditopang oleh peningkatan daya beli akan meningkatkan perilaku pembayaran pajak restoran. Gambar 3 menunjukkan bahwa tren data inflasi dan perilaku pembayaran pajak restoran cenderung sama-sama meningkat.

Pada variabel penanaman modal hotel dan restoran, baik modal asing maupun modal dalam negeri, memiliki koefisien variabel bertanda negatif. Ini menunjukkan bahwa variabel penanaman modal hotel dan restoran memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap perilaku pembayaran pajak restoran. Setiap penurunan 1% pada penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri hotel dan restoran akan meningkatkan sebesar 0.876% penanaman modal hotel dan restoran dalam negeri dan 0.163% penanaman modal hotel dan restoran luar negeri.



Gambar 4. DDI FDI Hotel Restoran dan Perilaku Pembayaran Pajak Restoran

Temuan ini mungkin terjadi karena data yang digunakan pada variabel penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing menyesuaikan ketersediaan data dari publikasi BKPM, yaitu data pada sektor hotel dan restoran belum terfokus pada data restoran saja. Selain itu, data yang digunakan juga merupakan data rata-rata dari total penanaman modal. Namun di sisi lain perlu juga dikaji lebih dalam terkait kepatuhan pembayaran pajak oleh para investor di sektor restoran. Temuan ini dapat juga mengindikasikan bahwa kepatuhan investor di sektor restoran dalam membayar pajak masih minim, sehingga peningkatan investasi (penanaman modal) bukannya meningkatkan penerimaan pajak justru memunculkan fenomena penurunan penerimaan pajak di sektor restoran. Gambar 4 menunjukkan tren data penanaman modal dan perilaku pembayaran pajak restoran.

KESIMPULAN

Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis model makroekonomi, maka faktor makroekonomi yang signifikan memengaruhi perilaku pembayaran pajak restoran dalam negeri adalah PDRB subsektor dan perlu menjadi perhatian dalam pengambilan kebijakan adalah variabel PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, pengangguran (*unemployment*), wajib pajak aktif (WP), indeks tendensi konsumen (ITK) dan inflasi (INF). Untuk dapat mencapai target penerimaan pajak, pemerintah perlu memperhatikan PDRB sektor Penyediaan Makan Minum. Kebijakan yang menstimulus peningkatan output baik dari sisi konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor pada sektor penyediaan makan dan minum akan meningkatkan potensi perilaku pembayaran pajak restoran.

Pemerintah juga perlu mengeluarkan kebijakan yang dapat menekan angka pengangguran agar potensi perilaku pembayaran pajak restoran semakin meningkat. Menurunnya angka pengangguran akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat akan dapat meningkatkan daya beli masyarakat pada produk restoran. Di samping itu, kebijakan yang akan diambil oleh pihak pemerintah daerah juga perlu mendorong peningkatan pelaku usaha restoran yang patuh menjadi wajib pajak aktif. Bertambahnya wajib pajak juga akan meningkatkan potensi perilaku pembayaran pajak restoran. Beberapa poin lain yang perlu diperhatikan adalah indeks tendensi konsumen. Indeks ini perlu dijaga agar terus tumbuh meningkat karena meningkatnya ITK akan meningkatkan potensi pajak restoran. Untuk dapat meningkatkan ITK, pemerintah perlu menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Inflasi yang menjadi cermin daya beli masyarakat juga perlu ditingkatkan. Meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan potensi perilaku pembayaran pajak restoran. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi lebih mendalam terkait kepatuhan investor di sektor restoran dalam membayarkan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adytian, R. A., & Rosa, T. (2023). Pengaruh Struktur Efektifitas Modal Kerja, Liquiditas, Solvabilitas Terhadap Profitabilitas Perusahaan. *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, 1(2), 85-90.
- Anggoro, D. D., & Aprilian, Y. A. (2019). Deficiency Prinsip Keadilan Dalam Implementasi E-Tax Kota Malang Berdasarkan Prinsip Kebijakan Pajak Yang Baik. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 3(1). <https://doi.org/10.31092/jpi.v3i1.229>
- Brockmann H, Genschel P, Seelkopf L. (2016). Happy taxation: increasing tax compliance through positive rewards? *Journal of Public Policy*, cambridge.org.
- Castro, G. Á., & Camarillo, D. B. R. (2014). Determinants of tax revenue in OECD countries over the period 2001-2011. *Contaduria y Administracion*, 59(3), 35-59. [https://doi.org/10.1016/s0186-1042\(14\)71265-3](https://doi.org/10.1016/s0186-1042(14)71265-3)
- Chaudhry, I. S., & Munir, F. (2010). Determinants of Low Tax Revenue in Pakistan. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)*, 30(2), 439-452.
- Daly, H. E. (2006). Sustainable Development-Definitions, Principles, Policies (In The Future of Sustainability).
- Emas, R. (2015). The Concept of Sustainable Development: Definition and Defining Principles

- Entas, D. (2019). Potensi Kawasan Blok M Square Sebagai Ikon Destinasi Wisata Kuliner Lesehan Di Jakarta. *Jurnal Industri Pariwisata*, 2(1), 51–61. <https://doi.org/10.36441/pariwisata.v2i1.30>
- Gnangnon, S. K. (2021). Export product diversification, poverty and tax revenue in developing countries. *Journal of International Trade and Economic Development*. <https://doi.org/10.1080/09638199.2021.1919182>
- Gupta, A. Sen. (2007). Determinants of Tax Revenue Efforts in Developing Countries (Issue 1). <https://www.elibrary.imf.org/view/journals/001/2007/184/article-A001-en.xml>
- Halizah, S. N., & Darmawan, D. (2022). Development Entrepreneurship Intention as an Effort to Improve the Level of the Consumer Household Economy. *Bulletin of Science, Technology and Society*, 1(1), 30–34.
- Hornig, J. S., & Tsai, C. T. S. (2012). Constructing Indicators of Culinary Tourism Strategy: An Application of Resource-Based Theory. *Journal of Travel and Tourism Marketing*, 29(8), 796–816. <https://doi.org/10.1080/10548408.2012.730945>
- Ignatov, E., & Smith, S. L. J. (2006). Segmenting Canadian culinary tourists. *Current Issues in Tourism*, 9(3), 235–255. <https://doi.org/10.2167/cit/229.0>
- Kadafi, M., Mersa, N. A., & Putri, H. S. (2020). Determinan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Eksis*, 16(1), 97–105.
- Keputusan Kepala Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 455 Tahun 2017 Tentang Penetapan Formulasi Perhitungan Potensi Dan Target Penerimaan Pajak Daerah.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2018). *Prinsip-prinsip Pemasaran (Edisi 12)*. Erlangga.
- Long, C., & Miller, M. (2017). Briefing note Shaping policy for development Taxation and the Sustainable Development Goals Do good things come to those who tax more? <https://about.jstor.org/terms>
- Luhur, E. S. (2018). Potensi Free Trade Agreement (FTA) Asean- Kanada Terhadap Ekspor Produk Perikanan Indonesia. Doctoral dissertation. IPB University.
- Malasulastri, S. I., & Rosa, T. (2023). Pengaruh Analisis Rasio Profitabilitas dan Solvabilitas untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Suatu Perusahaan. *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, 1(2), 136-147.
- Martinez-Vazquez, J., & Bird Richard M. (2014). Sustainable Development Requires a Good Tax System. Taxation and development: The weakest link. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=xfuYBAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Sustainable+development+requires+taxes&ots=vqDhOs6zAm&sig=xuL9IhUO1dDL0SB71TeG-1f5NI0&redir_esc=y#v=onepage&q=Sustainable%20development%20requires%20taxes&f=false
- Muibi, S. O., & Sinbo, O. O. (2013). Macroeconomic Determinants of Tax Revenue in Nigeria (1970-2011). *World Applied Sciences Journal*, 28(1), 27–35. <https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2013.28.01.1189>
- Olsen, W. K., Warde, A., & Martens, L. (2000). Social Differentiation And The Market For Eating Out In The UK. *International Journal of Hospitality Management*, 19(2), 173–190.
- Parker S.R. (1997). Forecasting Investment opportunities Through Dynamic Simulation, Proceedings of the 1997 Winter Simulation Conference ed. <http://proquest.umi.com/pqdweb?index=7&did=987146451&SrchMode=1&sid=1&Fmt=6&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS=1174701606&clientId=42788>

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

Putri, P. I. (2013). JEJAK. *Journal of Economics and Policy*, 6(2), 195–201.
<https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3596>

Rosa, T., & Sinang, K. (2023). Studi Literatur: Analisis Kinerja Keuangan pada Perusahaan Menggunakan Literature Review. *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, 1(2), 103-113.

Sandry, R., & Rosa, T. (2023). Analisis Pengaruh Return on Investment dan Residual Income untuk Menilai Kinerja Keuangan di Suatu Perusahaan. *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, 1(2), 91-102.

Sasana, H. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan:: Studi kasus di Kabupaten Boyolali. *Dinamika Pembangunan*, 9(2), 19–29.

http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=30638&obyek_id=4

Saudi, S. N. D., Anshar, M. A., Kausar, A., Muchsidin, M., & Muchsidin, F. F. (2021). Analysis of Economic Growth and Income Disparity on Inter-Regional Welfare. *Point of View Research Economic Development*, 2(4), 68–87.
<https://journal.accountingpointofview.id/index.php/povred>

Simatupang T. G., (1995). *Pemodelan Sistem*, Penerbit Hindita Klaten.

Sinaga, M. (2020). Analysis of Effect of GRDP (Gross Regional Domestic Product) Per Capita, Inequality Distribution Income, Unemployment and HDI (Human Development Index) on Poverty. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(3), 2309–2317.
<https://doi.org/10.33258/birci.v3i3.1177>

Sitompul S. M. (2000). *Konsep Dasar Model Simulasi*, Bahan Ajar 3.

Suhayat, J., Suwatno, S., & Buchdadi, A. D. (2023). Pengaruh Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Guru Berdasarkan Persepsi Kepala Sekolah. *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, 1(1), 40-51.

Sugiarto, Y., Danurdara, A. B., & Rofi, N. (2015). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah, 2.

Undang–Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kewenangan Pajak Kabupaten/Kota berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009

Velaj, E., & Prendi, L. (2014). Tax Revenue - the Determinant Factors- the Case of Albania. *European Scientific Journal* 1(September), 526–531.

Yasin, F., Erningsih, & Rahmad, D. (2017). Fenomena Wisata Kuliner Keluarga. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pkm Sosial, Ekonomi Dan Humaniora*, 171–178.